

Good Corporate Governance Dan *Financial Distress* Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia

Fahira Ninda Febriyanti¹ dan Sholikha Oktavi Khalifaturofi'ah^{2*}

^{1,2}Department of Management, Faculty of Economic and Business, University of Hayam
Wuruk Perbanas, Surabaya, Indonesia

Email Address:

Fahiraninda86@gmail.com, sholikha@perbanas.ac.id*

*Corresponding author

Submitted 21-07-2023

Reviewed 14-07-2023

Revised 16-07-2023

Accepted 28-07-2023

Published 28-07-2023

Abstract: Good Corporate Governance is important for companies to overcome financial difficulties. This study intends to analyze good corporate governance and its influence on predicting the condition of companies in *financial distress*. Good corporate governance is proxied by institutional ownership, managerial ownership, directors, the board of commissioners, and the audit committee. By using logistic regression for 21 manufacturing companies from 2015 to 2019, it was found that the board of directors and audit committee had a negative effect on *financial distress*. The board of commissioners has a positive effect on *financial distress*. The other variables, namely institutional and managerial ownership, have no effect on *financial distress*. To avoid *financial distress* in manufacturing companies, it is necessary to have a large board of directors and an audit committee, but not a board of commissioners. The fewer the boards of commissioners, the easier it will be for companies to control financial conditions to avoid financial distress.

Keywords: Financial Distress; Good Corporate Governance; Manufacture.

Abstrak: Penerapan Good Corporate Governance dinilai penting bagi perusahaan dalam mengatasi kondisi kesulitan keuangan. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis good corporate governance dan pengaruhnya untuk memprediksi kondisi perusahaan dalam *financial distress*. Good corporate governance diproksikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, direksi, dewan komisaris, dan komite audit. Dengan menggunakan regresi logistic untuk 21 perusahaan manufaktur selama 2015 sampai 2019, dihasilkan bahwa dewan direksi dan komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Variabel yang lainnya yaitu kepemilikan institusional dan manajerial tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Untuk menghindari kondisi *financial distress* pada perusahaan manufaktur, diperlukan banyaknya dewan direksi dan komite audit tetapi tidak untuk dewan komisaris. Semakin sedikit dewan komisaris akan semakin mudah bagi perusahaan untuk mengendalikan kondisi keuangan sehingga *financial distress* pun bisa dihindari.

Kata Kunci: *Financial Distress*; Good Corporate Governance; Manufaktur.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2018, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,170 persen. Akan tetapi, pada tahun 2019 menurun sebesar 5,020 persen. Bahkan tahun 2020 hanya mencapai angka 4,790 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi kinerja dari suatu perusahaan karena berdampak pada kondisi keuangan perusahaan (Setiawan, 2021). Meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi sebuah tuntutan bagi perusahaan untuk dapat mengembangkan inovasi serta melakukan perluasan agar mampu bersaing dengan perusahaan lain. Tetapi, tidak sedikit perusahaan yang tidak mampu untuk bersaing sehingga menyebabkan terjadinya kesulitan keuangan bahkan mengalami kebangkrutan.



Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa perusahaan manufaktur terus berada dalam tren penurunan (Malau et al., 2018). Apabila hal tersebut terus menerus terjadi akan mengakibatkan perusahaan di Indonesia sulit untuk bersaing dengan perusahaan lain sehingga menyebabkan terjadinya kondisi kesulitan keuangan karena perusahaan dinilai tidak mampu dalam menilai serta memprediksi kondisi keuangan perusahaan. Kondisi keuangan suatu perusahaan menyangkut keberlangsungan hidup dari perusahaan itu sendiri. Apabila perusahaan mengalami penurunan laba secara terus-menerus maka akan semakin besar pula kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau biasa disebut dengan kondisi *financial distress* (Arifiana dan Khalifaturofi'ah, 2022).

Kondisi *financial distress* menjadi ancaman bagi seluruh perusahaan dimana kondisi perusahaan yang tidak sehat dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup perusahaan. Permasalahan keuangan perusahaan memiliki pengaruh yang besar bukan hanya perusahaan yang mengalami kerugian tetapi *stakeholder* dan *shareholder* pun merasakan dampak apabila suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan (Sawitri, 2019)

Pada umumnya terdapat tiga alasan utama perusahaan mengalami *financial distress* (Ratna dan Marwati, 2018). Yaitu kurang handalnya dalam pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, pengelolaan aset yang kurang tepat, keuangan perusahaan yang tidak dikelola dengan baik, serta penerapan tata kelola perusahaan yang kurang baik (Vionita dan Lusmeida, 2019). Penerapan tata kelola perusahaan menjadi salah satu faktor yang berhubungan dengan terjadinya masalah kesulitan keuangan pada perusahaan. Apabila tata kelola perusahaan tidak dilakukan dengan baik dan benar maka dapat menyebabkan suatu perusahaan mengalami *financial distress*.

Penerapan mekanisme *good corporate governance* diakui mampu meningkatkan kinerja perusahaan (Taruli dan Panggabean, 2019) serta meningkatkan citra perusahaan dan kepuasan pelanggan sehingga kepercayaan investor terhadap perusahaan juga akan meningkat. Dengan demikian apabila kinerja perusahaan meningkat maka kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress* juga akan semakin rendah (Vionita dan Lusmeida, 2019).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pengaruh penerapan *good corporate governance* (GCG) terhadap kondisi *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Kebaruan dari penelitian ini dibanding penelitian sebelumnya (Alkhairani et al., 2020; Arifiana dan Khalifaturofi'ah, 2022; Ayu et al., 2018; Dirman, 2020; Taruli dan Panggabean, 2019) adalah penelitian ini menjawab gap penelitian terdahulu mengenai pengaruh GCG terhadap *financial distress*. Selain itu, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya (Yuliani dan Rahmatiasari, 2021) adalah penelitian ini tidak menambahkan variabel intervening dan lebih berfokus pada GCG terhadap *financial distress* selama 2015 sampai 2019.

KAJIAN TEORI

Teori Keagenan (*Agency Theory*). Teori keagenan merupakan suatu teori yang menjelaskan hubungan antara *principal* dan *agent*. Teori keagenan pertama kali dirumuskan oleh Jensen dan Meckling (Jensen dan Meckling, 1976) yang menyatakan bahwa teori keagenan merupakan suatu hubungan kontraktual dimana satu orang atau lebih yaitu *principal* dan *agent* untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada agen serta menunjuk sebagai manajemen yang mengelola perusahaan. Manajemen dalam mengelola



perusahaan diharapkan dapat menggunakan sumber daya yang ada secara optimal sehingga dapat menyejahterakan baik dalam jangka pendek maupun jangka Panjang.

Teori keagenan ini merupakan dasar yang dapat digunakan untuk memahami terkait penerapan *good corporate governance*. Menurut teori keagenan pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan dapat menimbulkan terjadinya konflik. Konflik yang terjadi ini biasa disebut *agency conflict* yang mana penyebabnya adalah pihak-pihak yang terkait yaitu pemegang saham dan manajemen perusahaan mempunyai kepentingan yang saling bertentangan satu sama lain. Permasalahan yang muncul terkait kepentingan yang saling bertentangan ini disebut *agency problem*. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme pengendalian yang dapat menyetarakan perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak (Ozili dan Uadiale, 2017). Dengan demikian diperlukan penerapan mekanisme *good corporate governance* untuk dapat menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemegang kepentingan, sehingga nantinya tidak terjadi konflik.

Financial distress. *Financial distress* merupakan suatu kondisi dimana keuangan dari suatu perusahaan dalam keadaan tidak sehat. Kondisi ini terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan. *Financial distress* merupakan suatu tahap penurunan kondisi keuangan yang signifikan yang mana dapat diidentifikasi sebagai awal mula terjadinya suatu masalah keuangan hingga dapat mengakibatkan perusahaan mengalami kebangkrutan (Pramudena dan Marti, 2017). Penelitian yang lain menjelaskan bahwa *financial distress* merupakan kondisi dimana keuangan suatu perusahaan pada setiap tahunnya mengalami penurunan secara terus-menerus (Arifiana dan Khalifaturofi'ah, 2022). Sedangkan kondisi perusahaan yang mengalami kebangkrutan dimana perusahaan sudah tidak beroperasi, tidak dapat membayar kewajiban perusahaan, tidak dapat membayar hutang, dan menutup semua kegiatan perusahaan. Apabila suatu perusahaan kondisi keuangannya sedang tidak sehat dalam hal ini perusahaan tersebut sedang mendekati kondisi *financial distress*.

Untuk dapat menentukan perusahaan yang mengalami kondisi *financial distress* dapat menggunakan 2 faktor sebagai alat untuk mengindikasikan yaitu *net income* pada perusahaan negatif dan *retained earning* pada perusahaan negatif (Sutra dan Mais, 2019). Menurut (Harahap, 2017) *financial distress* dapat dilihat dari *earning per share* (EPS) suatu perusahaan, yang mana apabila *earning per share* (EPS) perusahaan selalu negatif hal tersebut menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan per lembar saham yang akan dibagikan kepada pemegang saham.

Good Corporate Governance. *International Finance Corporation* (IFC) mendefinisikan bahwa tata kelola perusahaan sebagai struktur dan proses untuk arah dan kendali perusahaan. Menurut keputusan kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktek *good corporate governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan bahwa *corporate governance* merupakan suatu proses serta struktur yang dilakukan oleh seluruh organ pada BUMN agar nantinya dapat meningkatkan keberhasilan usaha serta akuntabilitas perusahaan sehingga dapat mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan dari *stakeholders*, dengan dilandasi oleh peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Pada dasarnya setiap perusahaan diharuskan untuk menerapkan asas *good corporate governance* dengan baik pada seluruh kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan yang diterapkan pada seluruh organ dalam perusahaan Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) asas dari *good corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan.



Mekanisme dalam penerapan *good corporate governance* dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal (Alkhairani et al., 2020). Yang meliputi faktor eksternal seperti investor, akuntan publik, pemberi pinjaman, serta lembaga yang mengesahkan suatu legalitas perusahaan. Untuk faktor internal meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit.

Kepemilikan Institusional dan *Financial distress*. Kepemilikan institusional merupakan bagian eksternal dalam penerapan mekanisme *good corporate governance*. Kepemilikan institusional sendiri merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh perusahaan lain dari total saham yang beredar (Septiani dan Dana, 2019). Perusahaan lain disini terdiri dari perusahaan asuransi, institusi keuangan, bank, perusahaan milik negara, dan pemerintah.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi yang dapat meminimalisasi terjadinya suatu konflik antar pemegang saham serta membantu dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan yang dapat merugikan perusahaan. Semakin tinggi proporsi kepemilikan institusional maka tingkat pengawasan terhadap manajemen perusahaan akan semakin meningkat dengan begitu kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress* semakin rendah.

Kepemilikan institusional akan mengurangi masalah keagenan karena pemegang saham oleh institusional akan membantu mengawasi perusahaan sehingga manajemen tidak akan bertindak merugikan pemegang saham (Septiani dan Dana, 2019). Pendapat serupa pada penelitian Rahma (Rahma et al., 2019) bahwa seperapapun besarnya persentase kepemilikan institusional dapat membuktikan adanya kemungkinan *financial distress*.

H₁: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.

Kepemilikan Manajerial dan *Financial distress*. Pada dasarnya dengan adanya struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan dapat menjadikan suatu komitmen untuk menyelamatkan perusahaan. Kepemilikan manajerial menurut (Jensen dan Meckling, 1976) merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* utama yang membantu mengendalikan masalah keagenan dan berpengaruh terhadap penurunan biaya perusahaan sehingga dapat menaikkan nilai perusahaan.

Penelitian (Purnama dan Trisnaningsih, 2021) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kepemilikan manajerial, dimana apabila kepemilikan manajerial dalam perusahaan semakin besar maka kemungkinan terjadinya kondisi *financial distress* pada perusahaan akan semakin rendah. Semakin besar kepemilikan manajerial maka mampu menyatukan berbagai kepentingan para pemegang saham dan manajer sehingga mampu mengurangi potensi terjadinya *financial distress*.

Dengan adanya kepemilikan manajerial dapat mengurangi adanya konflik kepentingan antara pemilik dengan manajer dalam perusahaan. Apabila manajer memiliki saham perusahaan mereka akan termotivasi untuk dapat meningkatkan laba perusahaan karena nantinya manajer akan mendapatkan dividen lebih banyak jika laba perusahaan tinggi sehingga nantinya dapat mensejahterakan para pemegang saham termasuk manajer dan menghindarkan dari kondisi *financial distress*.

H₂: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.



Dewan Direksi dan *Financial distress*. Dewan direksi merupakan suatu kelompok individu yang memiliki tugas dalam mewakili kepentingan perusahaan sekaligus sebagai penengah antara para pemegang saham dan manajemen perusahaan dalam proses pengambilan keputusan. Semakin banyaknya dewan direksi maka semakin banyak pula konflik yang akan muncul tetapi dengan semakin banyaknya dewan direksi maka konflik yang muncul akan cepat terselesaikan serta tingkat pengawasan terhadap manajemen semakin baik sehingga mampu menghindarkan dari *financial distress*. Semakin besar jumlah dewan direksi maka akan semakin kecil potensi terjadinya kesulitan keuangan (Ayu et al., 2018).

H₃: Dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.

Dewan Komisaris dan *Financial distress*. Dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi (Purnama dan Trisnarningsih, 2021). Dengan adanya dewan komisaris ini diharapkan dapat mengurangi konflik keagenan yang timbul antara pihak satu dengan yang lain. Oleh karena itu dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Dewan komisaris berfungsi sebagai monitoring dari implementasi kebijakan yang dibuat oleh direksi. Semakin kecilnya jumlah dewan komisaris dalam perusahaan artinya fungsi monitoring yang dijalankan dalam perusahaan relatif lebih lemah sehingga dapat meningkatkan potensi terjadinya kesulitan keuangan dalam perusahaan (Harahap, 2017).

Dengan adanya dewan komisaris maka dapat menghindarkan terjadinya asimetri informasi antara para pemegang saham yang mana dapat memungkinkan manajemen dalam mengambil keputusan yang kurang efektif dan tepat bagi perusahaan. Sehingga semakin banyak ukuran dewan komisaris dalam suatu perusahaan maka akan semakin kecil pula kemungkinan terjadinya asimetri informasi antar pemegang saham sehingga kemungkinan terjadinya konflik keagenan juga akan semakin rendah dan perusahaan dapat memaksimalkan kinerjanya dengan begitu kemungkinan terjadinya kondisi *financial distress* juga akan semakin rendah.

H₄: Dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.

Komite Audit dan *Financial distress*. Komite audit menurut revisi peraturan nomor IX.I.5 Bapepam LK (2011) adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas serta fungsi dari dewan komisaris. Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015 pasal 4 yang berisikan bahwa komite audit paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independent dan pihak luar perusahaan publik.

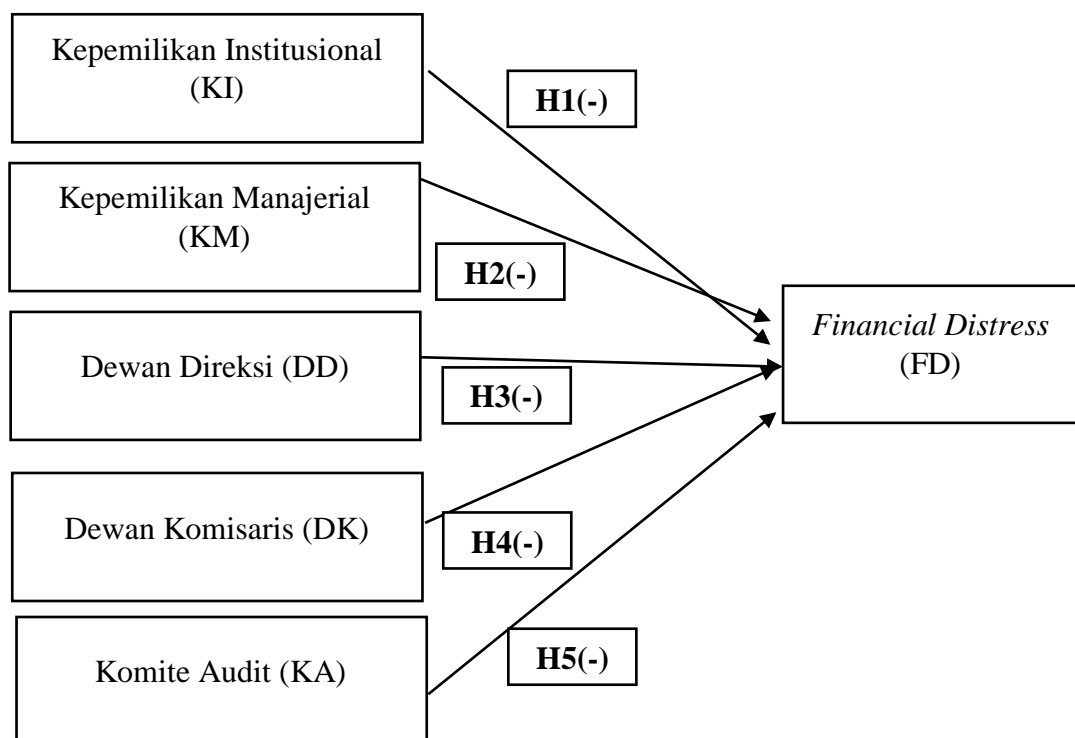
Komite audit menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) merupakan mekanisme *corporate governance* yang diasumsikan mampu mengurangi masalah keagenan yang timbul dalam suatu perusahaan. Kompetensi komite audit juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi perusahaan. Komite audit ini berfungsi untuk memberikan segala informasi yang menyangkut masalah dimana berkaitan dengan akuntansi, pelaporan keuangan sekaligus penjelasannya, sistem pengawasan, serta auditor.

Komite audit merupakan komite yang dibentuk guna menjalankan tugas dalam membantu kinerja dewan komisaris. Komite audit bertugas dalam memastikan laporan

keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Dengan begitu semakin banyaknya komite audit maka pengawasan terhadap laporan keuangan akan semakin baik dan terhindar dari hal-hal yang nantinya akan merugikan perusahaan sehingga dapat meminimalisasikan terjadinya kondisi *financial distress*.

H₅: Komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.

Berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dari penelitian ini. Keseluruhan variabel good corporate governance berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Maksudnya adalah semakin banyak jumlah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit akan dapat memprediksi turunnya kondisi *financial distress* pada perusahaan manufaktur di Indonesia. **Gambar 1** menyajikan kerangka pemikiran dari penelitian ini.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian. Penelitian ini menggunakan variabel terikat yaitu *financial distress* (FD), variabel bebas yaitu kepemilikan institusional (KI), kepemilikan manajerial (KM), dewan direksi (DD), dewan komisaris (DK), komite audit (KA).

Financial distress. *Financial distress* merupakan suatu kondisi perusahaan dimana keuangan perusahaan sedang tidak sehat atau mengalami krisis keuangan. Pengukuran kondisi *financial distress* dengan menggunakan *earning per share* (EPS) yang dihasilkan pada suatu perusahaan negatif. Variabel dependen dalam penelitian ini dengan

menggunakan ukuran binomial dimana perusahaan yang memiliki kriteria *earning per share* (EPS) negatif maka akan diberi nilai satu (1) dan apabila perusahaan memiliki kriteria *earning per share* (EPS) positif maka akan diberi nilai (0).

Kepemilikan Institusional. Kepemilikan institusional adalah prosentase dari kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi. Pengukuran kepemilikan institusional berdasarkan jumlah persentase dari kepemilikan institusional yang berasal dari institusi perusahaan.

Kepemilikan institusional dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan institusional} = \frac{\text{Total saham yang dimiliki oleh perusahaan}}{\text{Total saham beredar}} \times 100 \text{ persen} \dots\dots\dots (1)$$

Kepemilikan Manajerial. Kepemilikan manajerial adalah prosentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen dimana merupakan pihak yang terlibat langsung dalam pembuatan keputusan perusahaan. Pengukuran kepemilikan manajerial menggunakan prosentase saham yang dimiliki manajemen dibandingkan dengan total saham yang beredar.

Kepemilikan manajerial dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan manajerial} = \frac{\text{Total saham yang dimiliki oleh manajerial}}{\text{Total saham beredar}} \times 100 \text{ persen} \dots\dots\dots (2)$$

Dewan Direksi. Ukuran dewan direksi adalah jumlah keseluruhan anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan. Pengukuran dewan direksi berdasarkan pada jumlah dewan direksi yang ada dalam suatu perusahaan.

Dewan direksi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Dewan direksi} = \text{Total anggota dewan direksi pada perusahaan} \dots\dots\dots (3)$$

Dewan Komisaris. Ukuran dewan komisaris adalah jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Pengukuran dewan komisaris berdasarkan pada jumlah dewan komisaris yang ada dalam suatu perusahaan.

Dewan komisaris dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Dewan komisaris} = \text{Total anggota dewan komisaris pada perusahaan} \dots\dots\dots (4)$$

Komite Audit. Ukuran komite audit adalah jumlah keseluruhan komite audit dalam suatu perusahaan. Pengukuran komite audit berdasarkan pada total komite audit yang berada dalam perusahaan.

Komite audit dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Komite audit} = \text{Total anggota komite audit pada perusahaan} \dots\dots\dots (5)$$

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015 sampai 2019. Pengambilan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang mana sesuai dengan kriteria penelitian seperti ditunjukkan pada **Tabel 1**.



Tabel 1. Klasifikasi Sampel Penelitian

Kriteria Pemilihan Sampel	Sampel
Perusahaan manufaktur yang terdaftar Bursa Efek Indonesia (BEI).	183
Perusahaan manufaktur tidak menerbitkan <i>annual report</i> periode 2015 sampai 2019 serta tidak memiliki pengungkapan <i>good corporate governance</i> .	(7)
Perusahaan yang dalam periode 2015 sampai 2019 tidak memiliki kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial minimal sebanyak tiga kali.	(64)
Perusahaan yang tidak mengalami penurunan kinerja keuangan dilihat dari pendapatan usaha.	(55)
Perusahaan yang tidak memiliki <i>net income</i> negatif.	(26)
Perusahaan yang tidak melaporkan kondisi keuangan dalam mata uang rupiah.	(9)
Total perusahaan yang memenuhi kriteria	22
Total sampel penelitian (22 x 5)	110

Sumber: data diolah, 2021

Data dan Metode Pengumpulan Data. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui *database* Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria yang telah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya. Berdasarkan pada metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan data sekunder tahunan yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi yang mana diperoleh melalui publikasi laporan tahunan yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiliki penurunan kinerja keuangan serta memiliki *net income* negatif dalam kurun waktu 2015 sampai 2019 melalui website www.idx.co.id.

HASIL

Analisis Deskriptif. Analisis deskriptif merupakan sebuah gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standart deviasi. Berikut ini hasil analisis deskriptif.

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

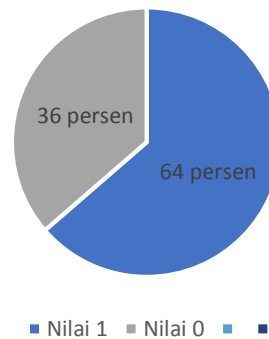
Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
<i>Financial distress</i>	110	0	1	0,640	0,480
Kepemilikan Institusional (persen)	110	0	48,890	21,330	15,700
Kepemilikan Manajerial (persen)	110	0	68,280	8,160	14,250
Dewan Direksi (orang)	110	2	13	4,500	2,450
Dewan Komisaris (orang)	110	2	10	3,910	1,670
Komite Audit (orang)	110	2	4	2,950	0,350

Sumber: data diolah, 2021



Secara keseluruhan, penelitian ini melibatkan 22 perusahaan, menurut analisis deskriptif. Studi ini mengumpulkan 110 data dari 22 perusahaan yang menjadi sampel selama 5 tahun. Perusahaan dengan EPS negatif diberi nilai 1 dan perusahaan dengan EPS positif diberi nilai 0. Pada **Tabel 2**, *Financial distress* adalah variabel dependen penelitian ini. Berikut ini merupakan diagram dari proporsi antara perusahaan FD dan NFD:

Kondisi Perusahaan



Gambar 2. Diagram Proporsi Perusahaan FD dan NFD

Sumber: data diolah, 2021

Gambar 2. menggambarkan tentang diagram proporsi perusahaan yang termasuk ke dalam *financial distress* dan bukan *financial distress*. Dari Gambar tersebut dapat diketahui bahwa sebanyak 22 perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Dari sampel penelitian tersebut, 14 perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan dengan kondisi *financial distress*/FD yaitu proporsinya sebesar 64 persen dan sebanyak 8 perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan *non financial distress*/NFD yaitu proporsinya sebesar 36 persen. Dapat dilihat nilai rata-rata sebesar 1 hal ini menunjukkan bahwa dari 22 perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian sebagian besar merupakan perusahaan yang mengalami *financial distress*. Dari **Tabel 2**, nilai standart deviasi dari variabel *financial distress* sebesar 0,480 yang mana nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-ratanya 0,640. Hal tersebut menunjukkan bahwa data tersebut bersifat homogen yang artinya terdapat variasi data yang baik.

Kepemilikan institusional pada **Tabel 2**, memiliki nilai minimal sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 48,890. Nilai rata-rata yang dihasilkan sebesar 21,330 dengan standart deviasi sebesar 15,700. Nilai minimum kepemilikan institusional yaitu sebesar 0 persen yang dimiliki oleh beberapa perusahaan. Perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan institusional diantaranya adalah PT Alumindo Light Metal Industry Tbk tahun 2015 dan 2016, PT Tri Banyan Tirta Tbk tahun 2018 dan 2019, PT Yanaprima Hastapersada Tbk tahun 2018 dan 2019, dan PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk tahun 2018-2019. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi. Nilai maksimum dari kepemilikan institusional sebesar 48,890 persen yaitu pada PT Panasia Indo Resources Tbk tahun 2017 yang kepemilikan institusinya dimiliki oleh Gold Gazelle Profits Corporation, Ortega Management Limited, Mercury Capital International Inc., dan Prime Invesco Limited yang merupakan perusahaan yang tidak terafiliasi. Hal ini menunjukkan bahwa saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi tinggi. Banyaknya kepemilikan institusional ini mengandung makna bahwa perusahaan mampu mengurangi terjadinya suatu konflik antar pemegang saham.

Nilai rata-rata dari kepemilikan institusional sebesar 22,370 persen. Artinya, jumlah keseluruhan sampel penelitian rata-rata perusahaan manufaktur memiliki kepemilikan institusional 22,370 persen. Dapat diketahui dari Tabel 2. nilai standart deviasi sebesar 15,700 lebih rendah dari nilai rata-rata sebesar 22,370. Hal tersebut menunjukkan bahwa data tersebut bersifat homogen yang artinya terdapat variasi data yang baik.

Selanjutnya dari variabel kepemilikan manajerial. Dari **Tabel 2.**, terlihat bahwa nilai minimumnya adalah 0 dan nilai maksimumnya 68,280. Rata-rata yang dihasilkan adalah 8,160 dan standar deviasinya adalah 14,25. Kepemilikan manajerial terendah dipegang oleh PT Argo Pantes Tbk tahun 2018 dan 2019, PT Asahimas Flat Glass Tbk pada tahun 2017 dan 2019, dan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk tahun 2015 dan 2016. Hal ini menunjukkan direksi dari perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki kepentingan apapun dalam saham perusahaan. Kepemilikan manajerial tertinggi pada PT Langgeng Makmur Industri Tbk sebesar 68,280 persen dari tahun 2016 hingga 2019 menunjukkan kepemilikan saham direksi tinggi. Artinya manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya guna meningkatkan keuntungan perusahaan, karena manajer memiliki bagian dari perusahaan.

Rerata nilai kepemilikan manajerial pada **Tabel 2.** adalah 8,160 persen. Dari jumlah sampel penelitian dapat diketahui bahwa rata-rata manajer perusahaan manufaktur hanya memiliki persentase kepemilikan saham perusahaan yang kecil. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya kepemilikan perusahaan tidak berpengaruh terhadap peningkatan kinerja manajemen perusahaan. Nilai standar deviasi dari kepemilikan manajerial adalah 14,250 yang lebih besar dari rata-ratanya 8,160. Hal ini menunjukkan bahwa data bersifat heterogen dan menunjukkan variasi yang cukup besar.

Nilai minimum ukuran dewan direksi sebesar 2 orang dan nilai maksimum sebesar 13 orang. Nilai rata-rata sebesar 4,500 setara dengan 5 orang dengan standart deviasi sebesar 2,450. Dari nilai rata-rata yang lebih besar dari standar deviasi mengindikasikan bahwa ukuran dewan direksi memiliki variasi data yang baik dan homogen. Nilai minimum ukuran dewan direksi sebesar 2 orang pada PT Berlina Tbk pada tahun 2019, PT Intraco Penta Tbk tahun 2019, PT Tri Banyan Tirta Tbk tahun 2017 hingga 2019, PT Yanaprima Hastapersada Tbk tahun 2016 hingga 2018, PT Inti Agri Resources Tbk tahun 2015 hingga 2019, PT Sunson Textile Manufacture Tbk tahun 2016, 2018, dan 2019 serta PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa perusahaan manufaktur tersebut mempunyai sedikit dewan direksi yaitu sebesar 2 orang. Nilai maksimum sebesar 13 orang dimiliki oleh PT Gajah Tunggal Tbk tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mempunyai banyak direksi yang memimpin perusahaan. Artinya tingkat pengawasan manajemen terhadap kinerja perusahaan efisien sehingga mampu menghindarkan perusahaan dari hal-hal yang merugikan. Dewan Komisaris.

Ukuran dewan komisaris memiliki nilai minimum sebesar 2 orang dan nilai maksimum sebesar 10 orang. Nilai rata-rata yang dihasilkan sebesar 3,910 atau setara dengan 4 orang dengan nilai standart deviasi sebesar 1,67. Nilai minimum ukuran dewan komisaris sebesar 2 orang dimiliki oleh PT Panasia Indo Resources Tbk pada tahun 2019, PT Langgeng Makmur Industri Tbk pada tahun 2015 hingga 2019, PT Tri Banyan Tirta Tbk pada tahun 2017 hingga 2019, PT Asiaplast Industries Tbk tahun 2018 dan 2019, PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk tahun 2016 dan 2017 serta PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa perusahaan tersebut mempunyai sedikit dewan komisaris. Sedikitnya dewan komisaris pada sebuah perusahaan mempunyai arti bahwa kemampuan perusahaan dalam mengambil keputusan kurang efektif sehingga dapat



mengakibatkan terjadinya asimetri informasi antar pemegang saham (Harahap, 2017). Nilai maksimum sebesar 10 orang terdapat pada PT Gajah Tunggal Tbk tahun 2018 dan 2019. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mempunyai banyak dewan komisaris pada perusahaannya. Artinya kemampuan perusahaan dalam mengambil keputusan dinilai efektif sehingga dapat menghindarkan adanya asimetri informasi antar pemegang saham. Nilai rata-rata ukuran dewan komisaris yaitu sebanyak 4 orang. Artinya sebagian besar sampel penelitian memiliki 4 dewan komisaris. Adanya dewan komisaris akan meminimalisir terjadinya asimetri informasi antara para pemegang saham sehingga memungkinkan manajemen mengambil keputusan yang tepat bagi perusahaan. Nilai standart deviasi sebesar 1,670 lebih rendah dari nilai rata-rata yaitu 4. Artinya data ukuran dewan komisaris bersifat homogen atau terdapat variasi data yang baik.

Nilai minimum komite audit pada **Tabel 2**, sebesar 2 orang dan nilai maksimum sebesar 4 orang. Nilai rata-ratanya sebesar 2,95 yang mana apabila dibulatkan yaitu sebesar 3 orang dengan standart deviasi sebesar 0,35. Artinya data komite audit bersifat homogen atau variasi datanya baik. Nilai minimum ukuran dewan komisaris sebesar 2 orang pada PT Martina Berto Tbk tahun 2015 hingga 2019, PT Panasia Indo Resources Tbk tahun 2015 hingga 2018 serta PT Sunson Textile Manufacture Tbk tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa perusahaan yang anggota komite auditnya tidak sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015 pasal 4 yang menyebutkan bahwa setiap perusahaan kurang lebih memiliki komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota. Dapat diartikan bahwa tingkat pengawasan manajemen perusahaan terhadap laporan keuangan perusahaan dinilai kurang baik. Nilai maksimum dari komite audit sebesar 4 orang yang dimiliki oleh PT Citra Tubindo Tbk tahun 2019 dan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk tahun 2015 hingga 2017. Artinya dua perusahaan tersebut memiliki anggota komite audit yang sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015 pasal 4. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tingkat pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan dinilai baik.

Nilai rata-rata ukuran komite audit sebesar 3 orang. Hal tersebut menunjukkan rata-rata perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian jumlah anggota komite audit sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015 pasal 4 yang menyebutkan bahwa setiap perusahaan kurang lebih memiliki komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota. Maka komite audit berpengaruh dalam melakukan pengawasan pada laporan keuangan perusahaan. Nilai standart deviasi sebesar 0,350 yang mana nilai tersebut lebih rendah dari nilai rata-rata. Hal tersebut menunjukkan bahwa data tersebut bersifat homogen yang artinya terdapat variasi data yang baik.

Setelah dilakukan analisis deskriptif maka dilakukan pengujian model dengan Hosmer dan Lemeshow Test. Berdasarkan hasil pengujian Hosmer dan Lemeshow Test, nilai signifikansinya sebesar 0,530 lebih besar dari α sebesar 0,050. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima yang artinya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit mampu memprediksi kondisi *financial distress*.

Tabel 3. Hasil Pengujian *Iteration History*

Iteration	Iteration History							
	-2 Log likelihood	Coefficients						
		Constant	KI	KM	DD	DK	KA	
Step	1	111,998	5,250	0,015	0,002	-0,448	0,297	-1,618
	2	108,376	8,241	0,021	0,004	-0,604	0,423	-2,631
	3	108,082	9,588	0,023	0,005	-0,647	0,460	-3,095
	4	108,077	9,798	0,024	0,005	-0,650	0,463	-3,166
	5	108,077	9,803	0,024	0,005	-0,650	0,463	-3,168
	6	108,077	9,803	0,024	0,005	-0,650	0,463	-3,168

Keterangan: Initial -2 Log Likelihood: 144,206

Sumber: data diolah, 2021

Pada **Tabel 3** dapat dilihat bahwa nilai *Initial -2Loglikelihood* sebesar 144,206 dan nilai tersebut turun menjadi 108,077. Dapat disimpulkan bahwa model fit dengan data yang artinya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit mampu memprediksi kondisi *financial distress* (Yuliani dan Rahmatiasari, 2021).

Nilai Nagelkarke R Square adalah sebesar 0,383. Artinya, dapat disimpulkan bahwa sebesar 38,300 persen *financial distress* suatu perusahaan mampu diprediksi dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit. Tahap selanjutnya akan dianalisis sampel penelitian dan klasifikasinya.

Tabel 4. Tabel Classification

Classification Table					
Observed		Predicted			
		Kondisi		Percentage Correct	
		FD	NFD		
Step 1	Kondisi	FD	20	20	50,000
		NFD	10	60	85,700
	Overall Percentage				72,700

Sumber: data diolah, 2021

Pada **Tabel 4**, diketahui bahwa dari 110 total data yang telah diteliti pada kategori *financial distress* diperoleh 70 data. Namun dari 70 data yang diperoleh hanya 60 data yang sesuai dan untuk sisanya yaitu sebanyak 10 data tergolong dalam data non *financial distress*, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok perusahaan yang mengalami *financial distress* dapat diprediksi dengan benar sebesar 85,700 persen. Sedangkan untuk kategori non *financial distress* diperoleh 40 data. Dari 40 data yang diperoleh ternyata hanya 20 data yang sesuai dan untuk 20 data sisanya tergolong dalam data *financial distress*, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok perusahaan yang tidak mengalami *financial distress* dapat diprediksi dengan benar sebesar 50 persen. Secara keseluruhan tingkat akurasi model dalam memprediksi kondisi *financial distress* sebesar 72,700 persen.

Tabel 5. Hasil Regresi Logistik

		Variables in the Equation					
		B	S.E.	Wald	DF	Sig.	Exp(B)
Step 1	KI	0,024	0,013	3,535	1	0,060	1,024
	KM	0,005	0,018	0,073	1	0,787	1,005
	DD	-0,650	0,163	15,863	1	0,000	0,522
	DK	0,463	0,200	5,347	1	0,021	1,589
	KA	-3,168	1,160	7,460	1	0,006	0,042
	Constant	9,803	3,607	7,386	1	0,007	1,808

Sumber: data diolah, 2021

Tabel 5 menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dengan nilai tingkat signifikansi sebesar 0,060 lebih tinggi daripada α sebesar 0,050 yang mana menunjukkan bahwa pengaruh kepemilikan institusional dalam memprediksi *financial distress* tidak berpengaruh secara signifikan.

Variabel kepemilikan manajerial berpengaruh positif dengan nilai tingkat signifikansi sebesar 0,787 lebih besar daripada α sebesar 0,050 yang mana menunjukkan bahwa pengaruh kepemilikan manajerial dalam memprediksi *financial distress* tidak signifikan.

Ukuran dewan direksi berpengaruh negatif dengan nilai tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih rendah daripada α sebesar 0,050 yang mana menunjukkan bahwa pengaruh ukuran dewan direksi dalam memprediksi *financial distress* berpengaruh secara signifikan.

Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dengan nilai tingkat signifikansi sebesar 0,021 lebih rendah daripada α sebesar 0,050 yang mana menunjukkan bahwa pengaruh ukuran dewan komisaris dalam memprediksi *financial distress* berpengaruh secara signifikan.

Ukuran komite audit berpengaruh negatif. Nilai tingkat signifikansi sebesar 0,006 lebih rendah daripada α sebesar 0,050 yang mana menunjukkan bahwa pengaruh ukuran komite audit dalam memprediksi *financial distress* berpengaruh secara signifikan.

DISKUSI

Pada **Tabel 6.** ini memuat ringkasan hasil penelitian sebagai berikut:

Tabel 6. Hipotesis dan Hasil Penelitian

Variabel	Hipotesis	Hasil
Kepemilikan institusional	Berpengaruh negatif terhadap <i>financial distress</i>	Tidak berpengaruh signifikan
Kepemilikan manajerial	Berpengaruh negatif terhadap <i>financial distress</i>	Tidak berpengaruh signifikan
Dewan Direksi	Berpengaruh negatif terhadap <i>financial distress</i>	Berpengaruh negatif terhadap <i>financial distress</i>
Dewan Komisaris	Berpengaruh negatif terhadap <i>financial distress</i>	Berpengaruh positif terhadap <i>financial distress</i>
Komite Audit	Berpengaruh negatif terhadap <i>financial distress</i>	Berpengaruh negatif terhadap <i>financial distress</i>

Sumber: Data diolah, 2021



Kepemilikan Institusional dan *Financial distress*. Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan institusi atas perusahaan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah banyaknya kepemilikan institusional akan menurunkan kondisi perusahaan dalam *financial distress*. Hasil penelitian sesuai **Tabel 6**, menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Artinya, kepemilikan institusional tidak dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi terjadinya *financial distress* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

Kepemilikan institusional dapat menimbulkan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana dalam perusahaan (Rahma et al., 2019). Namun kenyataannya tinggi rendahnya proporsi kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi maka kemungkinan perusahaan tersebut mengalami tekanan keuangan akan sama.

Dengan demikian pemegang saham tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam mengendalikan manajemen perusahaan sehingga memungkinkan perusahaan mengambil suatu keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri bahkan dapat merugikan perusahaan. Tinggi rendahnya proporsi kepemilikan institusional tidak mampu menghindarkan dari terjadinya kondisi kesulitan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Fathonah (Fathonah, 2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kondisi *financial distress*.

Kepemilikan Manajerial dan *Financial distress*. Kepemilikan manajerial adalah proporsi kepemilikan manajer atas perusahaan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah banyaknya kepemilikan manajerial akan menurunkan kondisi perusahaan dalam *financial distress*. Hasil penelitian sesuai **Tabel 6** menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Artinya, kepemilikan manajerial tidak dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi terjadinya *financial distress* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

Fathonah (Fathonah, 2016) menyatakan bahwa berapapun proporsi kepemilikan manajerial tidak mampu untuk mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*. Kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan hanya untuk menarik perhatian dari investor. Dimana apabila dalam suatu perusahaan para manajer memiliki saham perusahaan maka manajer akan meningkatkan kinerjanya untuk dapat menghasilkan laba yang lebih tinggi. Dengan begitu investor akan berasumsi bahwa nilai perusahaan meningkat dengan adanya kepemilikan manajerial. Namun kenyataannya besar kecilnya proporsi kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap terjadinya *financial distress* karena baik buruknya kinerja dari perusahaan tergantung pada kualitas dari pihak manajemen itu sendiri dalam mengelola perusahaan.

Besar kecilnya proporsi kepemilikan manajerial dalam perusahaan apabila manajemen tidak bekerja dengan sebaik mungkin maka tidak menutup kemungkinan perusahaan tersebut tetap mengalami kondisi *financial distress*. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fathonah (Fathonah, 2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kondisi *financial distress*.

Dewan Direksi dan *Financial distress*. Dewan direksi adalah banyaknya direksi yang memimpin suatu perusahaan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah banyaknya dewan direksi akan menurunkan kondisi perusahaan dalam *financial distress*. Dari **Tabel 6**, dewan direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial distress*. Artinya, semakin banyak dewan direksi maka akan dapat menurunkan terjadinya *financial distress* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

Dewan direksi dalam perusahaan membantu dalam proses pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup serta mampu memberikan keuntungan bagi

perusahaan. (Harahap, 2017) menyatakan bahwa jumlah dewan direksi yang besar mampu memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan karena terciptanya hubungan kerjasama dengan pihak luar dalam menjamin ketersediaan sumber daya.

Oleh sebab itu semakin banyak dewan direksi dalam perusahaan didukung dengan kualitas dari dewan direksi akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perusahaan karena terciptanya hubungan kerjasama yang lebih baik selain itu kualitas keputusan yang diambil semakin efektif dan dapat menguntungkan perusahaan serta mampu menghindarkan dari hal-hal yang merugikan keuangan perusahaan sehingga perusahaan dapat terhindar dari kondisi *financial distress*. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2017) yang menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh negatif dan signifikan.

Dewan Komisaris dan *Financial distress*. Dewan komisaris adalah banyaknya dewan komisaris atas suatu perusahaan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah banyaknya dewan komisaris akan menurunkan kondisi perusahaan dalam *financial distress*. Hasil penelitian sesuai **Tabel 6**, menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap *financial distress*. Artinya, dewan komisaris dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi terjadinya *financial distress* pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Semakin banyak dewan komisaris akan meningkatkan terjadinya *financial distress* di perusahaan.

Semakin banyak dewan komisaris maka akan memungkinkan perusahaan tersebut mengalami kondisi *financial distress* (Pramudena dan Marti, 2017). Semakin banyak dewan komisaris apabila perusahaan tersebut tidak memperhatikan bagaimana kualitas dari setiap anggota dewan komisaris hal tersebut dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya suatu konflik antar pemegang saham. Hal tersebut dapat terjadi karena apabila dewan komisaris tidak kompeten maka akan memungkinkan perusahaan mengambil keputusan kurang efektif serta dapat menyebabkan munculnya asimetri informasi antar pemegang saham dengan begitu akan memicu timbulnya suatu konflik keagenan.

Terjadinya suatu konflik keagenan maka akan memunculkan adanya *agency cost* hal tersebut membuat perusahaan mengeluarkan biaya yang lebih besar sehingga nantinya dapat meningkatkan kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramudena dan Marti (Pramudena dan Marti, 2017) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *financial distress*, yang mana semakin banyak dewan komisaris maka akan memungkinkan perusahaan tersebut mengalami kondisi *financial distress*.

Komite Audit dan *Financial distress*. Komite audit adalah banyaknya personil yang mengaudit perusahaan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah banyaknya komite audit akan menurunkan kondisi perusahaan dalam *financial distress*. Dari hasil penelitian yang ditunjukkan pada **Tabel 6**, komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial distress*. Artinya, komite audit dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi terjadinya *financial distress* pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Semakin banyak komite audit yang digunakan dalam suatu perusahaan akan menurunkan terjadinya kondisi *financial distress* di perusahaan itu.

Semakin banyak komite audit maka akan menghindarkan dari kondisi kesulitan keuangan (Malau et al., 2018). Dalam perusahaan semakin banyak komite audit yang kompeten dan handal dalam bidangnya maka akan meningkatkan pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan. Dengan begitu nantinya diharapkan mampu untuk menghindarkan perusahaan dari adanya hal-hal yang akan merugikan perusahaan seperti



adanya manipulasi terhadap laporan keuangan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup perusahaan sehingga nantinya mampu mengurangi potensi terjadinya *financial distress*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fathonah (2016) menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap kondisi *financial distress*.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai good corporate governance dan pengaruhnya terhadap *financial distress* dihasilkan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak dapat digunakan dalam memprediksi terjadinya *financial distress*. Variabel yang lain yaitu dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit dapat digunakan dalam memprediksi terjadinya *financial distress*. Semakin banyak dewan direksi dan komite audit maka akan semakin menurunkan terjadinya *financial distress* di perusahaan manufaktur. Akan tetapi, jika dewan komisaris semakin tinggi maka terjadinya *financial distress* juga semakin tinggi.

Saran yang dapat diberikan sebagai pengembangan penelitian terdapat dua macam yaitu untuk perusahaan dan penelitian selanjutnya. Bagi perusahaan, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada perusahaan serta manajemen terkait manfaat dari penerapan *good corporate governance*. Perusahaan mampu mengoptimalkan penerapan *good corporate governance* sehingga nantinya dapat meningkatkan pengawasan manajemen perusahaan sehingga dapat menghindarkan dari adanya kondisi kesulitan keuangan. Perusahaan diharapkan dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan kinerja serta proporsi dewan direksi dan komite karena dapat mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Perusahaan juga diharapkan mempertimbangkan terkait dewan komisaris dengan sebaik mungkin karena semakin besar jumlahnya maka akan semakin tinggi kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain seperti rasio keuangan sehingga terdapat variasi dalam penelitian tersebut. Pada variabel kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak semua perusahaan melakukan publikasi atas proporsi kepemilikan saham perusahaan sehingga diharapkan untuk mempertimbangkan hal ini. Pada variabel komite audit sebaiknya menggunakan jumlah pertemuan rapat yang dilakukan bukan total anggota komite audit agar nantinya data yang didapatkan juga lebih bervariasi.

Keterbatasan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal yaitu pertama, terdapat banyak perusahaan yang tidak melakukan publikasi terkait proporsi kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial yang dimiliki oleh perusahaan. Kedua, sampel yang sesuai dengan kriteria hanya sedikit karena dalam penelitian ini sampel yang dipilih merupakan perusahaan yang memiliki data lengkap seperti kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit. Yang mana apabila satu komponen tersebut tidak terdapat dalam perusahaan maka tidak dapat dipilih menjadi sampel penelitian. Ketiga, terdapat kekurangan pada sampel penelitian yang sesuai dengan kriteria penelitian yaitu perusahaan yang mengalami penurunan kinerja dan perusahaan dengan *net income* negatif. Keempat, pada sampel penelitian tidak proposional antara perusahaan yang mengalami *financial distress* dengan yang tidak mengalami *financial distress* sehingga adanya ketidakakuratan model dalam pengelompokan sampel penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Alkhairani, Kamaliah, and Rokhmawati, A. (2020). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Ekonomi Kiat*, 30(1), 10–25. <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>.
- Arifiana, R., and Khalifaturofi'ah, S. O. (2022). The Effect of Financial Ratios in Predicting Financial Distress in Manufacturing Companies. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 15(2), 103–108.
- Ayu, F., Friantin, S. H. E., and Nurdyastuti, T. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016. *Akuntansi STIE AUB Surakarta*, 5(1), 97–103.
- Dirman, A. (2020). Financial Distress: The Impacts Of Profitability, Liquidity, Leverage, Firm Size, And Free Cash Flow. *International Journal of Business, Economics and Law*, 22(1), 17–25.
- Fathonah, A. N. (2016). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governancedan Rasio Keuangan Terhadap Financial Distress. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 2(2), 533–542.
- Harahap, L. W. (2017). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Dan Firm Size Terhadap Kondisi Financial Distress Pada Perusahaan Property and Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010 - 2014. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 17(2), 1–12.
- Jensen, M. C., and Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(1), 305–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>.
- Malau, N. S., Tugiman, H., and Budiono, E. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016). *E-Proceeding of Management*, 5(1), 583–594.
- Ozili, P. K., and Uadiale, O. (2017). Ownership concentration and bank profitability. *Future Business Journal*, 3(2), 159–171. <https://doi.org/10.1016/j.fbj.2017.07.001>
- Pramudena, and Marti, S. (2017). Journal of Finance and Banking Review The Impact of Good Corporate Governance on Financial Distress in the Consumer Goods Sector. *J. Fin. Bank. Review*, 2(4), 46–55.
- Purnama, H. K., and Trisnaningsih, S. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Dengan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan LQ 45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Proceeding of National Conference On Accounting & Finance*, 3(18), 107–117. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art10>.
- Rahma, A. A., Nabawi, L., and Wijaya, R. A. (2019). Peran kepemilikan institusional, perencanaan pajak dan dewan komisaris asing terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis*, 8(2), 83–95. <https://doi.org/10.24036/jkmb.10885400>
- Ratna, I., and Marwati, M. (2018). Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Financial Distress Pada Perusahaan Yang Delisting Dari Jakarta Islamic Index Tahun 2012-2016. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 1(1), 51–62. [https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1\(1\).2044](https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(1).2044).



- Sawitri, N. N. (2019). FDPM after the global price crisis in the coal industry. *International Journal of Monetary Economics and Finance*, 12(1), 59–74. <https://doi.org/10.1504/IJMEF.2019.098699>.
- Septiani, N. M. I., and Dana, I. M. (2019). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Property Dan Real Estate. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(5), 3110–3137. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i05.p19>.
- Setiawan, I. (2021). The Impact of Financing Risk on Islamic Banking Performance in Indonesia. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 10(2), 212. <https://doi.org/10.22373/share.v10i2.9400>.
- Sutra, F. M., and Mais, R. G. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Financial Distress dengan Pendekatan Altman Z-Score pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 16(01), 34–72. <https://doi.org/10.36406/jam.v16i01.267>.
- Taruli, J. S., and Panggabean, R. R. (2019). Factors affecting profitability : Evidence from Indonesia and Malaysia. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 982–991.
- Vionita, and Lusmeida, H. (2019). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Good Corporate Governance Terhadap Financial Distress (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI 2014-2017). *Seminar Nasional & Call For Paper Seminar Bisnis Magister Manajemen*, 36–62.
- Yuliani, R., and Rahmatiasari, A. (2021). Pengaruh Corporate Governance terhadap Financial Distress dengan Kinerja Keuangan sebagai Variabel Moderating (Perusahaan Manufaktur di BEI). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 5(1), 38–54. <https://doi.org/10.18196/rabin.v5i1.11333>.

